

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

1. Hasil analisis integratif dengan pendekatan Location Quotient (LQ), Shift Share (SS), dan Analytic Hierarchy Process (AHP) berhasil mengidentifikasi empat komoditas tanaman obat unggulan yang memiliki signifikansi tinggi baik dari segi ekonomi, distribusi spasial, maupun nilai kultural, yaitu jahe (Kabupaten Simalungun), kapulaga (Kabupaten Karo), kencur (Kabupaten Deli Serdang), dan mengkudu (Kabupaten Asahan). Penetapan prioritas ini mempertimbangkan indikator kontekstual seperti keterkaitan dengan budaya lokal, pemanfaatan sebagai bahan baku produk herbal, serta persebaran budidaya lintas kabupaten/kota. Komoditas jahe ditetapkan sebagai prioritas utama, yang mencerminkan sinergi optimal antara daya saing spasial, nilai ekonomi, dan relevansi kultural.
2. Lebih lanjut, melalui pendekatan Metode Perbandingan Eksponensial (MPE), hasil penelitian menegaskan bahwa kombinasi antara kekayaan fitokimia (jumlah metabolit sekunder) dan skala ketersediaan bahan menjadi determinan utama dalam penetapan bahan baku strategis. Jahe menduduki posisi tertinggi dengan 102 jenis metabolit sekunder dan persebaran di 27 kabupaten/kota, diikuti oleh kapulaga (100 metabolit; 13 wilayah), kencur (6 metabolit; 26 wilayah), dan mengkudu (67 metabolit; 13 wilayah). Temuan ini menegaskan bahwa penilaian berbasis kandungan bioaktif dan distribusi wilayah mampu membentuk landasan yang ilmiah dan aplikatif bagi pembangunan industri herbal yang inklusif dan berbasis sumber daya lokal.
3. Dari sisi pengembangan kelembagaan dan strategi transformasi UKOT/UMOT, hasil integrasi analisis SWOT dan diskusi kelompok terfokus (FGD) menunjukkan bahwa keberhasilan pengembangan agroindustri herbal tidak hanya ditentukan oleh daya saing produk, tetapi juga oleh kemampuan sistem lokal dalam membentuk ekosistem produksi yang kolaboratif, adaptif, dan berkelanjutan. Strategi yang dihasilkan

meliputi penguatan kemitraan petani (bio-partnership), digitalisasi pasar, peningkatan kualitas produksi melalui penerapan CPOTB, serta penguatan kapasitas kelembagaan melalui optimalisasi infrastruktur, dukungan pemerintah daerah, dan kolaborasi riset dengan perguruan tinggi. Strategi ini menunjukkan keberpihakan pada sistem produksi yang tidak hanya merespons dinamika pasar, tetapi juga menegaskan pentingnya kearifan lokal sebagai fondasi transformasi agroindustri herbal di tingkat mikro.

## 5.2 Saran

1. Pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lintas sektor perlu merancang kebijakan pengembangan tanaman obat berbasis spasial-ekologis dan kultural dengan mengutamakan empat komoditas utama, yaitu jahe, kapulaga, kencur, dan mengkudu sebagai fondasi agroindustri herbal. Kebijakan tersebut harus tidak hanya bertumpu pada aspek produksi dan nilai ekonomi, tetapi juga menghargai pengetahuan lokal, sejarah budaya, dan praktik pengobatan tradisional masyarakat sebagai sumber legitimasi epistemik dalam pengambilan keputusan pembangunan.
2. Optimalisasi rantai nilai agroindustri herbal harus diarahkan pada pendekatan sistemik dan kolaboratif, dengan memperkuat kemitraan bio-partnership antara UKOT/UMOT dan petani, serta mengintegrasikan aspek teknologi, kelembagaan, dan pembelajaran sosial. Pendekatan ini memerlukan penataan ulang relasi antar pelaku dalam ekosistem, termasuk dukungan teknis dan kelembagaan dalam bentuk pelatihan CPOTB, fasilitasi logistik, dan akses pasar digital sebagai respons terhadap tuntutan kualitas global.
3. Institusi pendidikan, riset, dan pelatihan diharapkan mengambil peran sebagai penghubung antara inovasi ilmiah dan praktik lokal, melalui penguatan penelitian terapan, pemetaan kandungan metabolit sekunder tanaman obat, serta pelibatan masyarakat dalam ko-produksi pengetahuan. Hal ini penting untuk menjembatani diskrepansi antara logika saintifik dan praktik keseharian UKOT/UMOT, sehingga terwujud sistem produksi herbal yang reflektif, adaptif, dan berbasis nilai-nilai lokal.

4. Diperlukan sistem pembinaan yang menempatkan pelaku UKOT/UMOT sebagai subjek pembangunan, bukan sekadar objek intervensi, dengan menciptakan ruang dialog deliberatif antara pelaku usaha, otoritas regulatif (BPOM, Dinkes), dan aktor pasar. Perspektif hermeneutik di sini menuntut pemahaman yang mendalam terhadap dinamika pengalaman dan harapan para pelaku UKOT/UMOT dalam menjalankan praktiknya, agar strategi yang disusun tidak bersifat normatif dan teknokratis semata, tetapi kontekstual dan bermakna.
5. Penguatan basis data dan pemantauan berkelanjutan terhadap ekosistem tanaman obat perlu dikembangkan sebagai instrumen reflektif dalam pengambilan kebijakan, termasuk data metabolit sekunder, sebaran geografis, dan tingkat adaptasi teknologi. Dengan data tersebut, evaluasi kebijakan tidak hanya akan berbasis output kuantitatif, tetapi juga dapat menangkap dinamika epistemik, yaitu bagaimana pengetahuan lokal dan ilmiah bersaling silang dalam membentuk arah pembangunan sektor herbal yang adil, lestari, dan inklusif.

